

## KONSEP KURIKULUM MERDEKA : BERDASARKAN PERSPEKTIF FILSAFAT PROGRESIVISME JOHN DEWEY

**Penulis** : Sulthon Nur Risky  
**Institusi** : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
**Email Korespondensi** : sulthon.sertoe@gmail.com  
**DOI** : 10.53947/perspekt.v2i5.526

### Abstrak

Pemerintah Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya yaitu dengan mengembangkan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini, pendidikan Indonesia menggunakan Kurikulum Merdeka yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Melihat bagaimana Kurikulum Merdeka terbentuk menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas tentang konsep Kurikulum Merdeka dengan sudut pandang filsafat progresivisme menggunakan berbagai macam literatur untuk menelaah konsep-konsep yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana tujuannya adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian antara konsep Kurikulum Merdeka dengan filsafat pendidikan progresivisme, dimana keduanya menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan sekolah dalam mengeksplorasi kemampuan dan potensi peserta didik serta pembelajaran luar kelas yang diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan peserta didik.

**Kata Kunci:**  
 Kurikulum Merdeka,  
 Progresivisme,  
 Kebebasan, Kualitas  
 Pendidikan

### Abstract

*Indonesian Government continues to improve the quality of education, one example is by developing an educational curriculum. An effective curriculum could impact on improving the quality of education. Now, Indonesian education uses Merdeka Curriculum which is a development of the previous curriculum. Seeing how Merdeka Curriculum was formed, raises a variety of different points of view. Therefore, this study will discuss about the concept of Merdeka Curriculum with the perspective of the progressivism using various kinds of literature to examine relevant concepts. The approach used descriptive qualitative and the aim is to observe the phenomenon of education in Indonesia. The results of the study show that there is compatibility between the concept of Merdeka Curriculum and the perspective of the progressivism, where both emphasized the independence and freedom of the school in exploring the abilities and potential of students, along learning outside the classroom which is expected to optimize the development of students.*

**Keywords:**  
 Merdeka Curriculum,  
 Progressivism,  
 Freedom, Education  
 Quality

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan mesin penggerak kebudayaan. Pendidikan mampu melahirkan hal-hal yang kreatif dan inovatif dengan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ilmi, Darma, dan Azis (2020), pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kemampuan-kemampuan dasar yang bersifat fundamental, baik dari segi kognitif maupun perasaan emosional yang diarahkan pada

fitrah manusia dan sesamanya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang cerdas, memiliki moral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilannya secara optimal.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia selalu memberikan perhatian lebih dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, mulai dari program wajib belajar, beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, serta program-program lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, pendidikan merupakan elemen penting yang harus dipersiapkan secara matang jika suatu negara ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

Demi menjamin kualitas pendidikan yang bermutu, maka perlu suatu kebijakan berupa kurikulum yang digunakan sebagai landasan dasar dalam pendidikan, yang mencakup cara belajar, apa yang dipelajari, serta arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Purwananti (2016) bahwa kualitas pendidikan dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu budaya sekolah, proses belajar mengajar (kurikulum), dan realita di sekolah. Suryaman (2020) mengatakan bahwa kurikulum merupakan “ruh” pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEK, kompetensi yang diperlukan masyarakat, dan pengguna lulusan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu indikator dalam menentukan kualitas pendidikan.

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara dalam bidang matematika dan literasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan Indonesia adalah Kurikulum 2013 yang berbasis pada peningkatan karakter peserta didik agar dapat berpikir kritis dan inovatif. Berkaca dari hasil PISA tersebut dan merasa belum cukup dengan kurikulum yang digunakan, Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan baru yang dinamakan “Merdeka Belajar”.

Kurikulum Merdeka merupakan realisasi dari filsafat pendidikan progresivisme yang dituangkan dalam bentuk kebijakan perubahan atau penyempurnaan kurikulum. Filsafat progresivisme diprakarsai oleh seorang filsuf bernama John Dewey. Fadlillah (2017) mengatakan bahwa progresivisme mendukung pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada peserta didik (student-centered) serta bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Progresivisme menunjukkan bahwa manusia bergerak maju, konstruktif, dan aktif. Dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar perlu dipahami bahwa dari sudut pandang progresivisme, manusia mempunyai kemampuan yang unik dan berbeda-beda dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini akan mengkaji tentang konsep Kurikulum Merdeka dari sudut pandang filsafat progresivisme. Konsep Kurikulum Merdeka yang diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik berdasarkan prinsip kebebasan, sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih maju, berkualitas, dan sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

### A. KURIKULUM MERDEKA

Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru dari Kemendikbud RI yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Dalam pidatonya pada Hari Guru Nasional (Direktorat Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2019), Nadiem menjelaskan konsep “Merdeka Belajar” artinya kebebasan bagi sekolah, guru, dan peserta didik. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berinovasi, dan kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Suartana, Yasa, Candraningrat, Perdanawati, dan Setini (2021) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka berlandaskan beberapa teori yang pada umumnya memandang bahwa belajar yang bermakna dalam membangun kompetensi memerlukan improvisasi untuk membentuk pengetahuan. Kurikulum Merdeka ditujukan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rahayu, Rosita, Rahayuningsih, Hernawan, dan Prihantini (2022) mengatakan bahwa penilaian dalam Kurikulum Merdeka yang diterapkan adalah penilaian secara komprehensif yang mendorong peserta didik untuk mempunyai kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa membebani dengan ketercapaian skor minimal yang harus ditempuh atau dengan kata lain tidak ada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penilaian minimum dalam kurikulum tersebut, meliputi kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan survei karakter. Kemampuan literasi yang dimaksud tidak hanya sekedar mengukur kemampuan membaca, melainkan kemampuan untuk menganalisis isi bacaan. Kemampuan numerasi yang dinilai tidak hanya dalam pelajaran matematika, melainkan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan sehari-hari. Survei karakter bukan merupakan sebuah tes kepribadian, melainkan sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah dipraktikkan oleh peserta didik di sekolah.

Kurikulum Merdeka sejalan dengan *Outcome-Based Education*, lebih lanjut Sitermans (2020) mengatakan bahwa yaitu metode pembelajaran yang berfokus pada apa yang harus dilakukan peserta didik. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan mengalami perubahan dari yang semula berada di dalam kelas menjadi di luar kelas. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih nyaman karena peserta didik dapat berdiskusi dengan guru dan tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru. Dengan kurikulum ini, akan mendorong peserta didik menjadi lebih aktif untuk berani tampil di depan umum, kreatif, dan inovatif.

Guru diharapkan menjadi penggerak untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik serta diharapkan mengutamakan peserta didik di atas kepentingan lainnya.

Adanya konsep Kurikulum Merdeka ini akan mendorong sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, peserta didik dan orang tua tidak perlu merasa terbebani dengan nilai atau peringkat di kelas karena sejatinya setiap anak memiliki bakat, karakteristik, dan kecerdasan yang berbeda-beda sesuai kodratnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menyebutkan terdapat empat pokok kebijakan baru terkait dengan Kurikulum Merdeka, yaitu sebagai berikut:

**a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)**

USBN akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam menentukan kelulusan. Penilaian yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio, karya tulis, dan sebagainya. Pergantian USBN menjadi Asesmen Kompetensi sangat bermanfaat, khususnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, penilaian ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kompetensinya sehingga mengurangi tekanan psikologis dalam diri mereka. Bagi guru, penilaian ini membuat mereka merasa merdeka dalam mengajar dan memberikan penilaian karena menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

**b. Ujian Nasional (UN)**

UN akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada guru, peserta didik, dan orang tua, serta dianggap kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) menekankan pada kemampuan literasi dan numerik yang berdasarkan pada praktik berstandar internasional, seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*. Sedangkan Survei Karakter mengukur implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Pelaksanaan asesmen ini pada kelas 4, 8, dan 11 dengan harapan hasil yang didapatkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

**c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

RPP sebelumnya mencakup beberapa komponen yang apabila ditulis memuat puluhan halaman. Dengan kebijakan baru, RPP cukup satu halaman yang memuat tiga komponen inti, yaitu tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja guru dan menyederhanakan administrasi sehingga guru memiliki banyak waktu untuk merencanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara matang.

**d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi**

PPDB dengan sistem zonasi dibuat lebih fleksibel. Rancangan peraturan terbaru terdapat empat jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi minimal sebanyak 50%, jalur afirmasi minimal sebanyak 15%, jalur perpindahan maksimal sebanyak 5%, dan sisanya jalur prestasi sebanyak 0-30% yang disesuaikan dengan

kondisi daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah berwenang untuk menentukan proporsi akhir dan menentukan zonasi wilayah. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu beriringan dengan inisiatif lain dari pemerintah daerah, seperti distribusi guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

## B. FILSAFAT PROGRESIVISME

John Dewey merupakan seorang filsuf atau pendidik dari Amerika yang paling berpengaruh di abad ke-20. Vaughan (2018) mengatakan bahwa John Dewey dikenal sebagai salah satu “bapak” dari gerakan progresivisme. Pemikirannya tentang kebebasan pendidikan yang mengutamakan sifat humanisme. Maka dari itu, guru sebenarnya tidak dapat menyamaratakan kemampuan peserta didik karena akan menyebabkan mereka menjadi tertekan dan belajar tidak sesuai dengan keinginannya.

Secara bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju atau terus berkembang. Dalam KBBI, kata progresif diartikan ke arah kemajuan atau berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan sekarang. Dengan kata lain, progresif dapat diartikan juga sebagai gerakan perubahan dengan tujuan perbaikan. Menurut Muhmidayeli (2011), progresivisme merupakan sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Maka dari itu, progresivisme merupakan aliran filsafat yang menginginkan untuk mencapai suatu kemajuan demi terciptanya suatu perubahan secara cepat.

Muhmidayeli (2011) mengatakan bahwa progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar upaya memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memberikan beragam aktivitas yang mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Gutek (dalam Fadlillah, 2017) mengatakan bahwa progresivisme modern menekankan pada konsep “*progress*”, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, pendidikan akan berhasil jika mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya.

Jalaluddin dan Idi (2017) menyebutkan bahwa progresivisme sering dinamakan sebagai *instrumentalisme*, *eksperimentalisme*, dan *environmentalisme*. *Instrumentalisme* karena progresivisme menganggap bahwa kemampuan intelektual manusia dijadikan sebagai alat untuk hidup dan mengembangkan kepribadian. *Eksperimentalisme* karena progresivisme menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. *Environmentalisme* karena progresivisme menganggap lingkungan hidup akan mempengaruhi kepribadian seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat dalam praktik pendidikan menuju ke arah yang positif sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang mampu menghadapi berbagai permasalahan serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat. Maka dari itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan.

Sadulloh (2018) menjelaskan dalam aliran progresivisme, belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Menurut Yunus (2016), filsafat progresivisme ini menekankan pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

- a. Proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak
- b. Peserta didik harus aktif, bukan pasif
- c. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah
- d. Sekolah harus menciptakan iklim yang bersifat kooperatif dan demokratis
- e. Aktifitas pembelajaran lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan materi kajian

### **C. KONSEP KURIKULUM MERDEKA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT PROGRESIVISME**

Yunus (2016) menjelaskan bahwa pengertian kurikulum dari sudut pandang progresivisme merupakan pengalaman pedagogis, bersifat eksperimental, dan memiliki rencana serta susunan langkah yang teratur. Pengalaman belajar peserta didik berupa berbagai macam pengalaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, dimana setiap proses pembelajaran membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang seharusnya untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik serta memberikan pengalaman berharga bagi kehidupan mereka.

Dari pemaparan konsep Kurikulum Merdeka dan filsafat progresivisme, terlihat ada kesesuaian antara keduanya yaitu menekankan kemerdekaan dan keleluasaan sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik yang secara alamiah berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Hakikat merdeka dalam pendidikan berawal dari seorang pendidik sebelum menyampaikan atau mengajarkan materi kepada peserta didik. Sehingga, harapannya ada perubahan dalam cara mengajar kepada peserta didik dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman dan berpusat pada peserta didik. Juita dan Yusmaridi (2021) mengatakan bahwa peserta didik dan guru memiliki kesempatan untuk menggali potensi mereka masing-masing dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dengan kemerdekaan dan kebebasan ini, diharapkan pendidikan Indonesia menjadi semakin maju dan berkualitas, serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan bangsa.

Kesesuaian yang lain dapat dilihat dari penekanan agar peserta didik dapat berkembang secara alamiah dengan memberikan pengalaman langsung serta pembelajaran luar kelas yang diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan kemampuan peserta didik. Selain itu, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan sekolah menjadi tempat bagi peserta didik dalam mencapai kemerdekaannya. Oleh karena itu, hal yang paling penting dipahami adalah pembelajaran tidak hanya memberikan pengetahuan berupa kajian, melainkan kemampuan berpikir serta bernalar bagi peserta didik agar mampu memecahkan suatu permasalahan.

### 3. KESIMPULAN

Filsafat progresivisme menganggap pendidikan tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih mengedepankan proses pengembangan berbagai macam potensi yang dimiliki peserta didik. Seiring perkembangan zaman, maka sudah selayaknya pendidikan yang dilaksanakan dapat memperhatikan kemampuan peserta didik serta berupaya mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi nantinya.

Konsep Kurikulum Merdeka ternyata memiliki kesesuaian dengan filsafat pendidikan progresivisme, dimana keduanya menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik dengan cara yang fleksibel, natural, dan menyenangkan. Selain itu, pengalaman langsung serta pembelajaran luar kelas yang diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan kemampuan peserta didik. Filsafat progresivisme yang mendasari konsep Kurikulum Merdeka ini diharapkan mampu diterapkan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan maksimal sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul, yang dapat menghadapi berbagai macam permasalahan di masa mendatang sesuai dengan perkembangan zaman.

### 4. REFERENSI

- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Fadlillah, M. (2017). Aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*. <http://eprints.umpo.ac.id/5758/3/8>. *ASLI-ALIRAN PROGRESIVISME DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA.pdf*
- Ilmi, Z., Darma, D. C., & Azis, M. (2020). Independence in learning, education management, and industry 4.0: habitat Indonesia during COVID-19. *Journal of Anthropology of Sport and Physical Education*. [http://www.jaspe.ac.me/clanci/JASPE\\_2020\\_okt\\_Ilmi.pdf](http://www.jaspe.ac.me/clanci/JASPE_2020_okt_Ilmi.pdf)
- Jalaluddin, & Idi, A. (2017). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Juita, D., & Yusmaridi, M. (2021). The concept of “Merdeka Belajar” in the perspective of humanistic learning theory. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/view/111912/104732>
- Kemendikbud. (2019). *Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar>
- Muhmidayeli. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwananti, Y. S. (2016). Peningkatan kualitas pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia handal. *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)*.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak. *Jurnal Basicedu*. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/3237/pdf>
- Sadulloh, U. (2018). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Sekretariat GTK. (2019). Mengenal Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-konsep-merdeka-belajar-dan-guru-penggerak>
- Sistemans, I. J. (2020). Integrating competency-based education with a case-based or problem-based learning approach in online health sciences. In *Asia Pacific Education Review*. <https://doi.org/10.1007/s12564-020-09658-6>
- Suartana, I. W., Yasa, G. W., Candraningrat, I. R., Perdanawati, L. P. V. I., & Setini, M. (2021). Public policy in improving the self-learning curriculum based on social entrepreneurship and local wisdom. *International Journal of Early Childhood Special Education*. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V13I2.211151>
- Suradika, Agus, Virgana. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Suradika, A., Dewi, H.I., & Nasution, M.I. (2023). Project-based learning and problem-based learning models in critical and creative students. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 12(1), 153-167.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. <https://ejournal.unib.ac.id/semiba/article/view/13357/6512>
- Vaughan, K. (2018). Progressive education and racial justice: Examining the work of John Dewey. *Education and Culture*. <https://doi.org/10.5703/educationculture.34.2.0039>
- Yunus, H. A. (2016). Telaah aliran pendidikan progresivisme dan esensialisme dalam perspektif filsafat pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*. <https://doi.org/10.31949/jcp.v2i1.319>